

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENANGANAN MASALAH PEDAGANG KAKI LIMA (PK5)**

(Studi Deskriptif-Kualitatif Tentang Proses Implementasi Perda No.15 Tahun  
1990 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan PK5 di  
Kotamadya Dati II Kediri, di Kota Kediri, Jawa Timur)

kk

Fis AM 21 /03

San  
T

## **SKRIPSI**



Disusun Oleh :

**DION EKHA SANJAYA**  
NIM : 079615173

M I I K  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
SEMESTER GANJIL, 2002/2003**

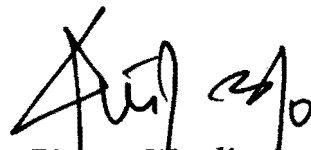
## HALAMAN PERSETUJUAN

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENANGANAN MASALAH PEDAGANG KAKI LIMA (PK5)**

(Studi Deskriptif-Kualitatif Tentang Proses Implementasi Perda No.15 Tahun 1990  
Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan PK5 di Kotamadya Dati II  
Kediri, di Kota Kediri)

**Skripsi ini telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diujikan**

Surabaya, 20 Desember 2002  
Dosen Pembimbing,



Drs. Bintoro Wardiyanto, MS.

NIP : 131 801 405

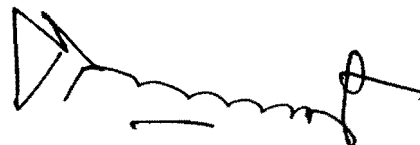
## HALAMAN PENGESAHAN

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENANGANAN MASALAH PEDAGANG KAKI LIMA (PK5)

(Studi Deskriptif-Kualitatif Tentang Proses Implementasi  
Perda No. 15 Tahun 1990 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan  
Pedagang Kaki Lima Di Kotamadya Daerah Tk. II Kediri,  
Di Kota Kediri)

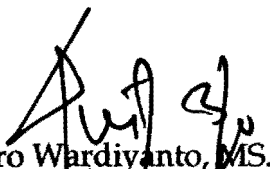
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada Hari Rabu, 15 Januari 2003 pukul 12.00-13.10  
di ruang 250 FISIP UNAIR

Mengetahui,  
Dosen Penguji I



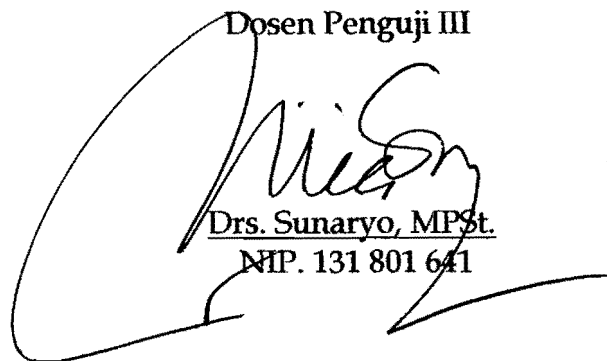
Drs. Falih Suaedi, MSi.  
NIP. 131 801 403

Dosen Penguji II



Drs. Bintoro Wardiyanto, MS.  
NIP. 131801 405

Dosen Penguji III



Drs. Sunaryo, MPSt.  
NIP. 131 801 641

## ABSTRAKSI

Sektor informal dan PK5 merupakan masalah sosial-ekonomi yang mengemuka sebagai tragedi nasional. Masalah ini merupakan masalah yang paling mencolok sejak krisis berlangsung sehingga menggugah penulis untuk mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian. Yang menarik, masalah ini mengandung implikasi yang dilematis. Di satu sisi sangat efektif dalam menekan angka pengangguran, di sisi lain keberadaan mereka selalu mengganggu kepentingan umum serta mengancam keindahan kota. Hal ini dikarenakan mereka, para PK5 selalu menempati jalan-jalan umum, pusat keramaian dan tempat-tempat umum lain sehingga tidak jarang mengganggu fungsi-fungsi publiknya.

Adalah Kediri, sebuah kota menengah di Jawa Timur, yang terletak 124 km. dari Ibukota Surabaya yang juga menempatkan masalah sektor informal dan PK5 sebagai salah satu agenda utama Pemerintah Kota. Pemilihan kota ini sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut pertimbangan penulis, sektor informal di kota ini akan menjadi menarik ketika diangkat ke sebuah penelitian, dimana saat ini penelitian tentang masalah tersebut jarang sekali diadakan. Padahal masalah ini tergolong sangat serius. Kalaupun ada, latar belakang disiplin ilmunya berbeda. Berdasarkan pengamatan dan hasil temuan di lapangan, kajian tentang Perda No.15 tahun 1990 yang sedianya merupakan satu-satunya pedoman dalam mengatur dan membina PK5, pun belum pernah ada. Akhirnya, hal ini menjadi pertimbangan utama peneliti untuk mengangkat figur Kota Kediri ke dalam sebuah penelitian Ilmu Administrasi Negara. Selain itu terdapat pertimbangan-pertimbangan lain yang sifatnya teknis, mengingat penulis merupakan orang Kediri asli. Bukan berarti penulis hanya mengindahkan kemudahan-kemudahan aksesnya, tetapi lebih pada pemahaman penulis terhadap tipologi masyarakat, budaya dan kehidupan sosial di Kota Kediri. Hal ini sangat membantu dalam penelitian, terutama pada saat turun lapangan.

Kemudian, metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Yaitu, bahwasanya penelitian ini berusaha memberikan gambaran tentang proses implementasi secara keseluruhan, berikut aktor dan aspek-aspek yang berpengaruh. Sesuai dengan namanya, pencarian data menggunakan jasa informan yang telah dipilih kompetensinya dan ditentukan jumlahnya. Kemudian diadakan wawancara secara mendalam, dengan menggunakan pedoman wawancara. Jadi, data yang diperoleh berupa kata-kata, yang disertai

dokumen serta foto sebagai data penunjang. Secara keseluruhan proses penelitian ini merupakan siklus yang interaktif, sehingga tidak ada penahanan kegiatan yang rinci dan kaku. Kegiatan pencarian data, reduksi, analisa dan verifikasi dilakukan secara bergantian dan berulang-ulang setiap ditemukan perkembangan baru di lapangan.

Di Kediri, penanganan PK5 berpedoman pada Perda No. 15 Tahun 1990 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan PK5. Apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kota secara umum masih kurang bagus, karena tidak ada cita-cita Perda yang dapat terealisasikan melainkan hanya sedikit sekali. Salah satu sebabnya adalah usia Perda yang sudah mencapai 12 tahun ini tergolong uzur, karena disahkan pada saat kondisi sosial-ekonomi regional-nasional sama sekali berbeda dengan kondisi sekarang. Selain itu juga adanya hambatan teknis seperti masalah dana, relokasi dan kinerja. Dengan demikian, secara keseluruhan proses implementasi Perda ini masih jauh dari sempurna.